

ANALISIS HUBUNGAN KEBIASAAN BERMEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP KEMAMPUAN MANAJEMEN WAKTU PADA SISWA KELAS IV SDIT MANBA'UL HIKMAH

Fika Nur Cahyati¹, Ira Restu Kurnia²

Universitas Pelita Bangsa^{1,2}

Email: 1coypiika07@gmail.com , 2kurniarestuira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis cara-cara di mana pemerintah Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, telah membantu UMKM di wilayah tersebut untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Pejabat pemerintah daerah dan pelaku usaha kerupuk kuning diwawancarai, diamati, dan didokumentasikan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dalam studi kualitatif deskriptif ini. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya fungsi regulasi, katalis, dan fasilitatif pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan UMKM. Bantuan diberikan dalam bentuk pelatihan, bantuan keuangan, pembinaan, dan pengembangan akses pasar. Dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam jumlah UMKM, pendapatan, dan laba perusahaan, yang menunjukkan bahwa tujuan pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2019 terdapat 18 UMKM, namun angka tersebut turun menjadi 15 pada tahun 2020 dan tetap stabil hingga 2023. Selain itu, penjualan perusahaan memang meningkat, meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Akibat faktor di luar kendali kami, seperti kenaikan harga bahan baku, kami mengalami penurunan persentase dan perubahan pola pencapaian laba.

Kata Kunci: UMKM, Peran Pemerintah Daerah, Pendapatan, Kerupuk Kuning, Pemberdayaan Ekonomi, Nagari Balah Aie.

Abstract

The primary objective of this study is to determine the many ways in which the local government in Nagari Balah Aie, VII Koto Sungai Sarik District, Padang Pariaman Regency has assisted small and medium-sized enterprise (MSME) entrepreneurs in the yellow cracker home business in increasing their income. Through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, this descriptive qualitative research compiles data from the village government and yellow cracker enterprises. The study's results stress the importance of MSMEs' interactions with local governments as regulators, catalysts, and facilitators. Help is provided in the shape of education, mentoring, grants, and the opening of new markets. The government's program implementation has been far from flawless, as seen by fluctuations in the number of small and medium-sized enterprises (SMEs), revenue, and business profitability from 2019 to 2023. The count of micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) declined from 18 units in 2019 to 15 units in

2020, and then stayed the same until 2023. Additionally, the percentage growth was smaller than in prior years, even if the company's income did increase nominally. Changes in fashion and the overall downward trend in percentages due to factors like rising raw material costs are examples of external issues that could impact profit gains.

Keywords: *UMKM, The Role of Local Government, Income, Yellow Crackers, Economic Empowerment, Nagari Balah Aie.*

A. PENDAHULUAN

Kelembagaan penting dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, faktor kelembagaan harus diperhitungkan dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa untuk tumbuh. Kehadiran kelembagaan secara signifikan membantu petani dan ekonomi desa dengan memfasilitasi pengaturan hubungan di antara para pencari nafkah dalam menciptakan pengeluaran ekonomi desa dan mengelola alokasi pengeluaran tersebut.¹

Partisipasi UMKM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu negara, usaha kecil, menengah, dan mikro sangatlah penting.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional, peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat vital karena mampu menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekspor, serta menstimulasi investasi domestik (Kemenkop UMKM, 2015). Kendati menyimpan potensi yang menjanjikan, pelaku UMKM masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, terutama keterbatasan permodalan serta minimnya akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan².

Peran UMKM juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Ketika UMKM diberdayakan secara optimal, maka akan terjadi peningkatan produktivitas yang berdampak pada meratanya distribusi penghasilan, terciptanya lapangan kerja baru, serta terbukanya layanan ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat.

¹ “Junianti Lubis, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).”

² “Lies Maria Hamza and Devi Agustien, “Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): 127–35.”

UMKM lokal seperti Nagari Balah Aie di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, sedang berkembang pesat. Hal ini terutama terlihat dalam industri kue kuning. Perusahaan pembuat kue kuning di Nagari Balah Aie merupakan usaha mikro yang mempekerjakan penduduk lokal. Kue kuning yang diproduksi dijual kepada pelanggan melalui pasar setelah selesai diproduksi. Perusahaan pembuat kue kuning ini dikategorikan sebagai usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang MSMEs. Menurut peraturan ini, usaha dengan pendapatan tahunan kurang dari Rp 300 juta dan total aset kurang dari Rp 50 juta diklasifikasikan sebagai usaha mikro. Syarat-syarat ini dipenuhi oleh perusahaan pembuat kue kuning, yang umumnya dijalankan oleh keluarga kecil atau individu.

Penulis melakukan observasi awal di tempat usaha kerupuk kuning yang berada di Nagari Balah Aie dan mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM Kerupuk Kuning 2019-2023

Tahun	Jumlah
2019	18
2020	15
2021	16
2022	15
2023	15

Sumber : hasil wawancara dengan pemilik usaha

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kerupuk Kuning dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah UMKM tercatat sebanyak 18, namun mengalami penurunan menjadi 15 pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah UMKM meningkat sedikit menjadi 16 pada tahun 2021, tetapi kembali turun menjadi 15 pada tahun 2022 dan tetap stagnan di angka yang sama hingga tahun 2023. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kecil pada tahun 2021, secara keseluruhan jumlah UMKM Kerupuk Kuning cenderung stabil di angka 15 selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Usaha Kerupuk Kuning 2019-2023

Tahun	Pendapatan	Naik/turun	
		Σ	%
2019	1.177.462.019	-	-

2020	944.962.020	(232.499.999)	19%
2021	1.216.962.021	272.000.001	28%
2022	1.392.862.022	175.900.001	14%
2023	1.417.462.023	24.600.001	17%

Sumber : hasil wawancara dengan pemilik usaha (data diolah)

Berdasarkan data tabel 2 diatas menggambarkan pendapatan dari beberapa usaha kerupuk kuning dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat *fluktuasi* yang signifikan dalam hasil keuangan. Pada tahun 2020, pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 232.499.999, atau sekitar 19. Namun, pada tahun 2021, perusahaan berhasil mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp 272.000.001, atau 28%, yang menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan. Meskipun ada penurunan kenaikan pada tahun 2022, dengan pertumbuhan yang lebih rendah sebesar 14% atau sebesar Rp 175.900.001, pada tahun 2023 perusahaan masih mencatatkan kenaikan, meskipun lebih kecil, yaitu sebesar 17% atau sebesar Rp 24.600.001. *Fluktuasi* pendapatan ini menandakan adanya dinamika yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha kerupuk kuning dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Perkembangan Laba 2019-2023

Tahun	Laba	Naik/turun	
		Σ	%
2019	699.212.000	-	-
2020	429.520.000	(269.692.000)	(38,57%)
2021	560.524.000	131.004.000	30,50%
2022	604.608.000	44.084.000	7,86%
2023	564.256.000	40.352.000	6,67%

Sumber : hasil wawancara dengan pemilik usaha (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 diatas mengenai data perkembangan laba perusahaan selama lima tahun terakhir, dapat dilihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 699.212.000, namun pada tahun 2020, terjadi penurunan yang drastis sebesar 38,57%, yakni sebesar 269.692.000, sehingga pendapatan turun menjadi 429.520.000. Meskipun pada tahun 2021 pendapatan mengalami kenaikan sebesar 30,50%, mencapai 560.524.000, namun kenaikan tersebut tidak mampu mempertahankan momentum yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, pendapatan hanya meningkat sebesar 7,86%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan laba

mejadi sebesar 6,67%.. Dilihat dari data pendapatan laba dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan laba namun persentase laba mengalami penurunan terjadi pada usaha kerupuk kuning di Nagari Balah Aie.

Pemerintah, yang berperan sebagai penyelenggara pembangunan di daerah tersebut, Harus menanggung beban perubahan sosial dan komunitas yang akan datang di desa tersebut. Akibatnya, agar wilayah tersebut dapat berkembang, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pemikiran kritis di kalangan warganya. yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGUSAHA UMKM (STUDI KASUS HOME : INDUSTRI KERUPUK KUNING NAGARI BALAH AIE KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN).**

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemerintah Daerah

Harus menanggung beban perubahan sosial dan komunitas yang akan datang di desa tersebut. Akibatnya, agar wilayah tersebut dapat berkembang, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong pemikiran kritis di kalangan warganya.yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul

1. Desentralisasi memerlukan reformasi regional.
2. Restrukturisasi regional yang disebutkan dalam paragraf (1) bertujuan untuk:
 - a. Untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintah daerah, mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
 - b. Guna mendorong perbaikan mutu pengelolaan
 - c. Guna memperkuat posisi bersaing di tingkat dalam negeri maupun kawasan
 - d. Sebagai upaya menjaga kekhasan nilai-nilai lokal, warisan tradisional, serta identitas budaya setempat
3. Perencanaan ruang, sebagaimana disebutkan dalam paragraf (1), berkaitan dengan penciptaan dan modifikasi wilayah.

4. Penciptaan dan modifikasi wilayah, sebagaimana disebutkan dalam paragraf (3), dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan strategis nasional.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah memainkan peran penting dalam keberhasilan pertumbuhan UMKM sebagai berikut:

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Fungsi pemerintah sebagai fasilitator. Tugas fasilitator adalah membantu UMKM dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya lainnya. Demikian pula, jika UMKM mengalami kekurangan keuangan, tanggung jawab fasilitator adalah membantu mengidentifikasi solusi yang memberikan akses ke pendanaan yang diperlukan, sambil memastikan kemajuan mereka menuju kemandirian.³

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menyediakan kerangka prinsip untuk menyeimbangkan pengelolaan pembangunan, memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efisien baik secara administratif maupun operasional. Berikut ini adalah indikator untuk menilai fungsi pemerintah sebagai regulator:

- 1) Merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan para pemangku kepentingan UMKM.
- 2) Mampu memenuhi persyaratan pengelompokan UMKM
- 3) Produktivitas perusahaan UMKM dapat ditingkatkan.
- 4) Mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan UMKM
- 5) Mampu meningkatkan kualitas dan hasil kinerja perusahaan UMKM

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah untuk bertindak sebagai agen yang mempercepat peningkatan potensi daerah-daerah yang akan berkembang menjadi bentuk-bentuk pembangunan partisipatif. Kriteria untuk mengevaluasi keterlibatan pemerintah sebagai katalisator adalah sebagai berikut:

³ “Raihan Syahrul Ramadhan et al., “PENELITIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN KOPERASI & UKM,” *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 3, no. 6 (2024): 51–60.”

- 1) Menangani beragam keluhan dari para pemangku kepentingan UMKM
- 2) Memfasilitasi kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan
- 3) Kapasitas staf penyuluh untuk mendukung pengelompokan UMKM
- 4) Kinerja fasilitator kelompok UMKM cukup memuaskan bagi kelompok UMKM.
- 5) Menciptakan prosedur dan strategi untuk memasarkan hasil bisnis UMKM.⁴

3. Peningkatan Pendapatan

a. Teori Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diperoleh dalam periode tertentu dari penjualan barang dan jasa dalam suatu unit bisnis. Pendapatan mengacu pada total pendapatan sebelum dikurangi biaya dan pengeluaran, sementara laba bersih menunjukkan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya dan beban.

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan

Yuyus Suyana dan Kartib Bayu menyatakan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi peningkatan pendapatan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pekerja Keras
- 2) Tidak pernah menyerah

4. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

BAB 1

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Bentuk kegiatan ekonomi yang dijalankan secara mandiri oleh individu dan memenuhi syarat sebagai usaha skala mikro sebagaimana tercantum dalam peraturan ini disebut sebagai usaha mikro.

⁴ “Rizal Zaelani, Hana Sujana, and Muhammad Zaky, “Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator Dan Pemahaman Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Sukabumi Kota,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (2022): 957–72.”

- 2) Unit usaha yang berdiri sendiri dan dikelola oleh individu maupun kelompok, yang tidak tergolong, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam klasifikasi ‘usaha kecil’ sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dikategorikan sebagai perusahaan kecil
- 3) Entitas ekonomi mandiri dengan aset bersih atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini dianggap sebagai perusahaan menengah. Entitas ini dijalankan oleh perorangan atau organisasi yang tidak berstatus sebagai bagian atau unit dari perusahaan kecil maupun besar.⁵

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1) Usaha mikro diatur berdasarkan prinsip Ilahi (nizhamun rabbaniyah).

Dasar-dasar ajaran ini bukan hasil rekayasa manusia, melainkan bersumber langsung dari ketetapan Ilahi yang termuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

2) Usaha mikro memiliki landasan keyakinan tauhid atau bersifat akidah (iqtishadun ‘aqdiyyun).

Ekonomi Islam terutama berasal dari keyakinan Islam (al-aqidah Al-Islamiyyah), di mana individu bertanggung jawab atas pandangan mereka.

3) Memiliki sifat pengabdian spiritual kepada Tuhan (berwatak ta’abbudiyah).

menyediakan kerangka regulasi dengan karakteristik ilahi (nizham rabbani).

4) Terkait dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*)

Islam tidak memisahkan etika dan ekonomi, maupun menganggap kemajuan ekonomi tanpa isu moral dalam paradigma Islam.

5) Elastis (*al-murunah*)

Al-murunah didasarkan pada premis bahwa Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber utama ekonomi.

6) Objektif (*al-maudhu’iyyah*)

Islam mewajibkan pengikutnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan objektivitas dan inisiatif. Kegiatan ekonomi secara fundamental mencakup pelaksanaan tugas yang harus dilakukan oleh setiap agen ekonomi, tanpa memandang gender, etnis, kewarganegaraan, agama, atau atribut lain.

⁵ UU-Nomor-20-Tahun-2008, n.d.”

7) Realistis (*al-waqi'yyah*)

Peramalan ekonomi, terutama di sektor bisnis, seringkali menampakkan ketidaksesuaian antara model teoritis dan implementasi nyata.

8) Harta kekayaan

pada dasarnya adalah milik Allah SWT, yang berarti bahwa kepemilikan seseorang atas kekayaan (alamwal) tidak bersifat permanen. Memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya keuangan (*tarsyid istikhdam al-mal*).⁶

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menguraikan suatu peristiwa atau gejala secara rinci melalui penjabaran kata-kata yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah.⁷

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti memilih lokasi ini karena usaha mikro kerupuk kuning mengalami penurunan pendapatan selama observasi di lapangan. Selain itu, lokasi tersebut mudah dijangkau dan memiliki lingkungan yang terbuka sehingga memudahkan proses penelitian.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Kajian ini memanfaatkan sumber informasi utama maupun tambahan sebagai bahan data :

a. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli, seperti wawancara atau pengamatan yang sering dilakukan oleh peneliti dengan usaha kue kerupuk kuning di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman.

⁶ “Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).”

⁷ “Trapenas Uniwara, *Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional Vol 1: “PELUANG DAN TANTANGAN PEMBELAJARAN DIGITAL DI ERA INDUSTRI 4.0 MENUJU ERA 5.0”* (Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional (Pro-Trapenas), 2021).”

b. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang disusun secara sistematis dan terstruktur, serta mencakup sejarah variabel yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan umum, publikasi akademik, dan catatan resmi dari entitas yang relevan dengan topik ini.⁸

4. Informan Penelitian

Moleong mendefinisikan informan penelitian sebagai individu yang memberikan pengetahuan tentang konteks penelitian dan memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti.⁹ Peneliti mengidentifikasi informan yang memiliki keahlian yang relevan dengan studi, karena mereka adalah individu yang paling berpengetahuan tentang topik penelitian. Peserta penelitian dalam studi ini adalah produsen kue kuning di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara memonitor perilaku secara metodis dalam konteks tertentu, kemudian mendokumentasikan dan mengevaluasi kejadian-kejadian yang diamati. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap individu-individu yang terlibat dalam Usaha Kerupuk Kuning di Nagari Balah Aie.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui interaksi lisan berupa pertanyaan dan jawaban, ditandai dengan kontak langsung antara satu atau lebih pewawancara dan satu atau lebih responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai catatan sejarah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dokumen dapat berupa teks tertulis, foto, atau karya penting yang dibuat oleh seseorang. Dokumen tertulis meliputi diary, memoar, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang ditampilkan dalam format visual, termasuk foto, visual langsung, dan

⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paradigma Kualitatif* (Grasindo, 2005)."

⁹ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," 2007."

ilustrasi. Dokumen yang diungkapkan sebagai karya seni, termasuk lukisan, patung, film, dan media serupa.¹⁰

6. Teknis analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menurut Huberman untuk menjawab pertanyaan penelitian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.¹¹

a. Pengumpulan Data

Fokus utama dalam studi ini terletak pada proses pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung, percakapan terarah secara mendalam, serta penelaahan dokumen, baik secara terpisah maupun dengan menggabungkan ketiganya melalui teknik triangulasi.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Jumlah data yang besar dikumpulkan dari lapangan, sehingga memerlukan pencatatan yang teliti dan komprehensif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, durasi keterlibatan peneliti dalam studi lapangan berkorelasi dengan peningkatan jumlah data, yang ditandai oleh kompleksitas dan kerumitan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk segera mengevaluasi data melalui reduksi data. Reduksi data meliputi ringkasan, seleksi, dan prioritas informasi penting, menyoroti fitur-fitur signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola.

c. Data Display (Penyajian Data)

Sesudah proses reduksi informasi, langkah selanjutnya ialah menampilkan data yang telah diperoleh. Dalam pendekatan kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk narasi ringkas, visualisasi seperti diagram, pemetaan keterkaitan antar kategori, alur kerja, maupun bentuk representasi lainnya.

d. Kesimpulan/Verifikasi

Tahapan keempat dalam proses analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan serta pengujian keabsahannya. Temuan awal diperlakukan sebagai kesimpulan sementara yang masih bisa diubah, terutama jika tidak ditemukan data pendukung yang memadai pada tahap pengumpulan informasi selanjutnya.¹²

¹⁰ Kuncoro Mudrajad, "Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi," Jakarta: Erlangga, 2003."

¹¹ Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" (Bandung: pustaka setia, 2002)."

¹² PROF. DR . SUGIYONO, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ALFABET BANDUNG, 2022), 141"

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah mencakup tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelayan publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan UMKM di Indonesia sangat erat kaitannya dengan dukungan dan upaya pemerintah yang mendorong pembiayaan serta memberikan pelatihan bagi usaha-usaha tersebut.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator dalam Pengembangan Usaha Kerupuk Kuning di Nagari Balah Aie.

1. Peran Pemerintah dalam Aspek Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah Nagari Balah Aie sebelumnya telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang ditujukan kepada pelaku usaha kerupuk kuning, terutama kelompok perempuan. Pelatihan ini dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19 dengan materi yang mencakup teknik pembuatan produk, pengemasan, dan pengelolaan usaha kecil. Dari pernyataan Sekretaris Nagari, Ibu Zermawati MZ, pelatihan ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan agar bisa mandiri secara ekonomi.

Dari sisi pelaku usaha, Ibu Raslimarni dan Ibu Samsidar mengakui bahwa pelatihan tersebut sangat membantu mereka dalam memahami aspek usaha, meskipun jumlah peserta terbatas dan kegiatan serupa belum dilanjutkan kembali pasca-pandemi. Beberapa pelaku usaha lainnya, seperti Ibu Sarinam, Ibu Lilis, dan Ibu Diyah Nurmalasari menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti pelatihan tersebut karena tidak mendapat informasi atau tidak tergabung dalam kelompok usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berupaya memberikan pelatihan, masih ada kekurangan dalam penyebaran informasi dan inklusivitas peserta.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan sudah berjalan namun belum merata. Perlu ada perbaikan dalam hal sosialisasi dan pemetaan penerima manfaat agar semua pelaku UMKM mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.

2. Peran Pemerintah dalam Bantuan Permodalan dan Alat Penunjang Kerja

Modal usaha merupakan tantangan besar bagi pelaku usaha kerupuk kuning. Pemerintah Nagari Balah Aie memiliki kebijakan untuk menyalurkan dana bantuan melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Skemanya adalah pelaku usaha atau

kelompok usaha harus mengajukan proposal yang disetujui oleh wali korong dan wali nagari. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha tidak memahami cara menyusun proposal tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Diyah dan Ibu Samsidar. Mereka merasa kesulitan karena harus mengurus administrasi sendiri sementara waktu dan tenaga mereka habis untuk produksi.

Sementara itu, bantuan alat kerja seperti mesin vakum minyak hanya diterima oleh satu usaha, yang dinilai tidak relevan bagi semua pelaku karena mengubah cita rasa kerupuk. Sebagian besar pelaku usaha lebih menginginkan alat pamarut singkong yang dinilai lebih bermanfaat untuk efisiensi produksi.

Dengan demikian, meskipun pemerintah telah berupaya memberikan bantuan, peran sebagai fasilitator dan katalisator belum optimal. Skema permodalan melalui proposal dianggap kurang efektif karena tidak mempertimbangkan keterbatasan SDM dari pelaku UMKM. Di sinilah letak tantangan bagi pemerintah sebagai katalisator, yang seharusnya dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyediakan pendampingan langsung.

3. Peran Pemerintah dalam Pemasaran dan Promosi Produk

Dalam aspek pemasaran dan promosi, pelaku usaha mengandalkan metode penjualan secara konvensional, baik melalui pasar maupun penjualan langsung dari rumah. Pemerintah nagari sendiri tidak terlibat dalam pemasaran langsung, tetapi ikut membantu dalam promosi dengan menjadikan kerupuk kuning sebagai oleh-oleh khas saat menyambut tamu pemerintah dari luar daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Nagari sebagai bentuk promosi simbolik terhadap produk lokal.

Namun, sebagian pelaku usaha seperti Ibu Raslimarni dan Ibu Samsidar menilai bahwa promosi melalui event lokal tidak memberikan dampak signifikan terhadap penjualan. Mereka jarang ikut event karena merasa kurang diminati oleh pengunjung. Di sisi lain, inisiatif promosi dari pemerintah belum sepenuhnya difokuskan pada peningkatan strategi pemasaran digital atau kolaborasi dengan platform online, yang sebenarnya sangat potensial di era saat ini.

Peran pemerintah sebagai regulator dan katalisator dalam hal ini masih belum cukup kuat. Dibutuhkan regulasi atau inisiatif nyata yang dapat mendorong pelaku

UMKM untuk go digital atau setidaknya memperluas jangkauan pasarnya melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti marketplace lokal atau nasional.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah Nagari Balah Aie dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi kembang api kuning, berikut ini dapat diuraikan temuan dan saran:

1. Peran Pemerintah Belum Optimal

Keterlibatan pemerintah Nagari Balah Aie dalam pengembangan UMKM yang memproduksi kembang api kuning, meskipun terlihat, belum optimal. Hal ini terlihat dari fungsi fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan yang tidak konsisten. serta masih terdapat kendala dalam peran sebagai regulator dan katalisator terkait bantuan modal dan akses informasi.

2. Pendidikan dan Pelatihan Terbatas

Pelatihan kewirausahaan yang pernah dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19 memberikan manfaat bagi sebagian pelaku usaha, terutama dalam hal peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Namun, kegiatan ini belum menjangkau seluruh pelaku UMKM, dan belum ada kelanjutan program pasca-pandemi.

3. Bantuan Permodalan Kurang Efektif

Skema bantuan permodalan melalui BUMNAG dengan mekanisme pengajuan proposal dinilai kurang efektif karena tidak mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM. Selain itu, bantuan alat penunjang kerja yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan mayoritas pelaku usaha.

4. Pemasaran dan Promosi Belum Terarah

Pemasaran produk kerupuk kuning masih dilakukan secara konvensional oleh pelaku usaha. Dukungan promosi dari pemerintah nagari, meskipun ada, belum terfokus pada strategi pemasaran digital atau kolaborasi dengan platform online yang lebih luas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Nagari Balah Aie untuk meningkatkan efektivitas peran dalam pengembangan UMKM kerupuk kuning:

1. Peningkatan Program Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Melakukan evaluasi terhadap program pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu ditingkatkan.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala dengan materi yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM, termasuk keterampilan pemasaran digital, manajemen keuangan, dan inovasi produk.
 - c. Memastikan informasi mengenai pelatihan dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM, termasuk yang tidak tergabung dalam kelompok usaha.
2. Penyederhanaan Akses Permodalan
 - a. Menyederhanakan mekanisme pengajuan bantuan permodalan dengan mempertimbangkan keterbatasan SDM pelaku UMKM.
 - b. Menyediakan pendampingan dalam penyusunan proposal atau memberikan alternatif skema bantuan yang lebih mudah diakses.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyaluran dana melalui BUMNAG dan mencari solusi untuk mengatasi kendala yang ada.
3. Pemberian Bantuan Alat Penunjang yang Tepat Sasara
 - a. Melakukan survei kebutuhan alat penunjang kerja kepada seluruh pelaku UMKM untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.
 - b. Memberikan prioritas pada bantuan alat yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, seperti alat pamarut singkong.
4. Pengembangan Strategi Pemasaran yang Komprehensif
 - a. Mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif, termasuk pemanfaatan platform digital dan media sosial.
 - b. Memfasilitasi kerja sama antara pelaku UMKM dengan marketplace lokal atau nasional.
 - c. Mengadakan event promosi yang lebih menarik dan efektif dalam menjangkau pasar yang lebih luas.
5. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi
 - a. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, serta BAZNAS, untuk memaksimalkan dukungan kepada UMKM.
 - b. Menjalin kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga lain yang memiliki

kompetensi dalam pengembangan UMKM.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan peran pemerintah Nagari Balah Aie dalam mengembangkan UMKM kerupuk kuning dapat lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. *Panduan Praktis Meneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hamza, Lies Maria, dan Devi Agustien. “UMKM dan Pendapatan Nasional.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8(2), 2019: 127–135.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Lubis, Junianti. “Peran Desa dalam Penguatan Ekonomi Lokal.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. *Riset Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Prasetyo, Yoyok. *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Kediri: Aria Mandiri Group, 2018.
- Ramadhan, Raihan Syahrul, dkk. “Kebijakan Pemerintah dalam Koperasi dan UKM.” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 3(6), 2024: 51–60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabet Bandung, 2022.
- Uniwara, Trapenas. *Pembelajaran Digital Menuju Era 5.0*. Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional, 2021.
- UU No. 20 Tahun 2008.
- Zaelani, Rizal, Hana Sujana, dan Muhammad Zaky. “Peran Pemerintah dalam UMKM Syariah.” *Jurnal MEA* 6(3), 2022: 957–972.